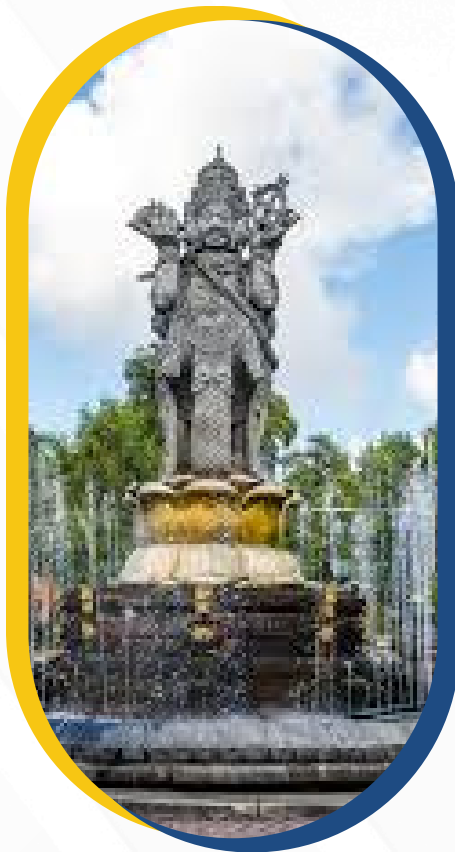




Dinas Pertanian

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) ATAS DATA 2025



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa - Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan perkenan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota Denpasar pada Tahun Anggaran 2025.


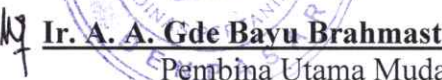
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian Kota Denpasar atas data tahun 2025 kami susun sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh stakeholders kepada pemerintah, pada dasarnya adalah menyajikan capaian kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategic (Renstra) yang telah ditetapkan. Penyusunannya mengacu pada Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja tahunan dimaksud adalah keberhasilan serta kegagalan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam perencanaan kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Kami sadar, walau telah berusaha menyusun seoptimal mungkin, laporan ini masih jauh dari sempurna seperti yang diharapkan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak yang dapat memperbaiki laporan ini, sangat kami harapkan untuk kemajuan di tahun-tahun yang akan datang.

Semoga buku laporan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua dan terimakasih.

Denpasar, 5 Pebruari 2026

Kepala Dinas Pertanian
Kota Denpasar,



Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660803 199203 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Amanah undang-undang berupa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka setiap organisasi / satuan kerja instansi pemerintah diwajibkan membuat pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan suatu organisasi, sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategic yang telah ditetapkan. Sesuai hal tersebut, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Pertanian Kota Denpasar menyusun laporan kinerja instansi pemerintah yang disebut LKjIP atas data Tahun 2025.

Berawal dari Perencanaan Strategik (RENSTRA) yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dinas selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program. Selanjutnya pelaksanaan Renstra ini dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja / Kinerja yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan hasilnya disebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dari RKT ini disusunlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya akan ditetapkan sebagai Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), dimana Dinas Pertanian Kota Denpasar akan melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Ke depan, dengan melihat potensi, kemampuan dan tantangan yang ada diharapkan pembangunan di bidang pertanian di Kota Denpasar akan semakin terpacu untuk maju.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Isu Strategis	3
1.3. Struktur Organisasi Dinas	4
1.4. Sistematika Penulisan	13
II. RENCANA KINERJA	14
2.1. Perencanaan Strategis	15
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian dan Analisis Kinerja Dinas	22
3.2. Akuntabilitas Keuangan Dinas	62
3.3. Prestasi yang diraih	66
IV. PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matrix Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025
- Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian
- Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025
- Lampiran 4. Pernyataan Komitmen Tahun 2025 antara Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar
- Lampiran 5. Lampiran Pernyataan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025
- Lampiran 6. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Denpasar adalah kabupaten/kota termuda di Propinsi Bali yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992. Pembangunan Kota Denpasar merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah Propinsi Bali serta pembangunan nasional, sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam perencanaan pembangunan nasional, pembangunan bidang pertanian masih menjadi prioritas utama. Dalam pada itu pembangunan pertanian harus merupakan usaha yang terpadu dengan pembangunan daerah dan pedesaan. Dengan demikian sector pertanian dituntut untuk tumbuh dan berkembang dengan laju yang cukup tinggi sekaligus harus memecahkan permasalahan ekonomi nasional seperti penyediaan pangan, bahan baku untuk industri, peningkatan penerimaan devisa, menciptakan lapangan kerja dan peningkatan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas dilaksanakan melalui usaha-usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi. Tujuan pembangunan pertanian bukan saja untuk meningkatkan produksi pertanian yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan ekspor, melainkan juga untuk meningkatkan pendapatan sebagian terbesar rakyat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat rakyat pedesaan, serta untuk menjadikan pertanian semakin kuat guna mendukung pembangunan di sektor industri. Pengelolaan potensi sumberdaya pertanian tidak lagi hanya mengandalkan peningkatan produksi akan tetapi juga dikelola berorientasi kepada kebutuhan pasar.

Salah satu tuntutan public dewasa ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance),

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategic yang dirumuskan sebelumnya. Untuk mengukur kinerja atau keberhasilan suatu pembangunan maka seluruh kegiatan dinas Tahun Anggaran 2025 perlu diketahui tingkat relevansi, efisiensi dan efektifitasnya, manfaat dan dampak yang ditimbulkannya. Evaluasi pembangunan juga dimaksudkan untuk menyempurnakan setiap kegiatan pada tahun berikutnya dan membantu perencana dalam penyusunan program di masa mendatang.

Bertitiktolak dari hal inilah, maka pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengintruksikan untuk melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah baik propinsi maupun kabupaten / Kota. Dengan ketersediaan anggaran dan berbagai fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas, maka perlu diperhatikan tingkat akuntabilitas dan kinerja dinas, yang disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas dimaksudkan sebagai kewajiban Dinas Pertanian Kota Denpasar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2025. Serta sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja dinas di tahun mendatang.

1.2. Isu Strategis

Melihat perkembangan Kota Denpasar saat ini, swasembada pangan semakin terasa sulit untuk tercapai. Belakangan ini masalah pangan menjadi sangat serius, terbukti dengan adanya kenaikan harga beras yang melambung, begitu juga dengan harga pangan yang lain. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakatnya, aliran pasokan bahan kebutuhan pokok datang dari Pulau Jawa, Lombok bahkan Sumatera. Hal ini dapat terjadi karena sektor pertanian semakin ditinggalkan dan seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk, banyak lahan-lahan yang produktif sudah beralih fungsi (alih fungsi lahan) menjadi permukiman / perumahan. Maka dari itulah sangat dibutuhkan dukungan dan keberpihakan pemerintah pada sektor pertanian sehingga menimbulkan keinginan para pemuda untuk terjun di bidang pertanian. Keberpihakan itu pada nantinya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani atau bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Sektor pertanian, selain sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional juga semakin penting dan strategis searah dengan arus perubahan lingkup nasional bahkan internasional dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Salah satu indikator kesejahteraan rakyat (petani) adalah tingkat pendapatan yang meningkat. Peningkatan pendapatan dapat diperoleh dengan penganekaragaman usahatani serta adanya pendapatan lain di luar usahatani. Sumberdaya lahan merupakan asset dalam merencanakan pengelolaan suatu usahatani. Tipe dan kualitas sumberdaya yang tersedia merupakan batasan usahatani yang dilakukan oleh petani. Pentingnya sektor pertanian dapat dilihat dari kontribusi yang dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional. Kontribusi

dominan sektor pertanian khususnya dalam pemantapan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Secara garis besar kebijakan pembangunan pertanian diprioritaskan kepada beberapa program kerja yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran dari pembangunan pertanian. Pada umumnya kegiatan usahatani dilaksanakan dalam skala kecil, akibatnya pendapatan rendah, hanya dapat dipergunakan untuk membiayai hidupnya.

Beberapa permasalahan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan program-program pembangunan di bidang pertanian ke depan, yang bisa dijadikan isu-isu strategis antara lain :

1. Pendapatan petani belum optimal (masih rendah).
2. Berkurangnya luas lahan pertanian / alih fungsi lahan dan kepemilikan lahan pertanian yang kecil / sempit.
3. Belum memadainya infrastruktur pertanian.
4. Masih kurangnya pembinaan dan penerapan teknologi presisi.

1.3. Struktur Organisasi Dinas

Dinas Pertanian sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2023 Dinas Daerah (Dinas Pertanian Kota Denpasar) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pertanian.

Dinas Pertanian Kota Denpasar mempunyai kinerja pelayanan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pertanian berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas

2. Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Pertanian yang meliputi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Bina Usaha dan Pengolahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan produksi pertanian
3. Memberikan rekomendasi di Bidang Pertanian sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran proses perizinan
4. Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pertanian dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang.
6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja.

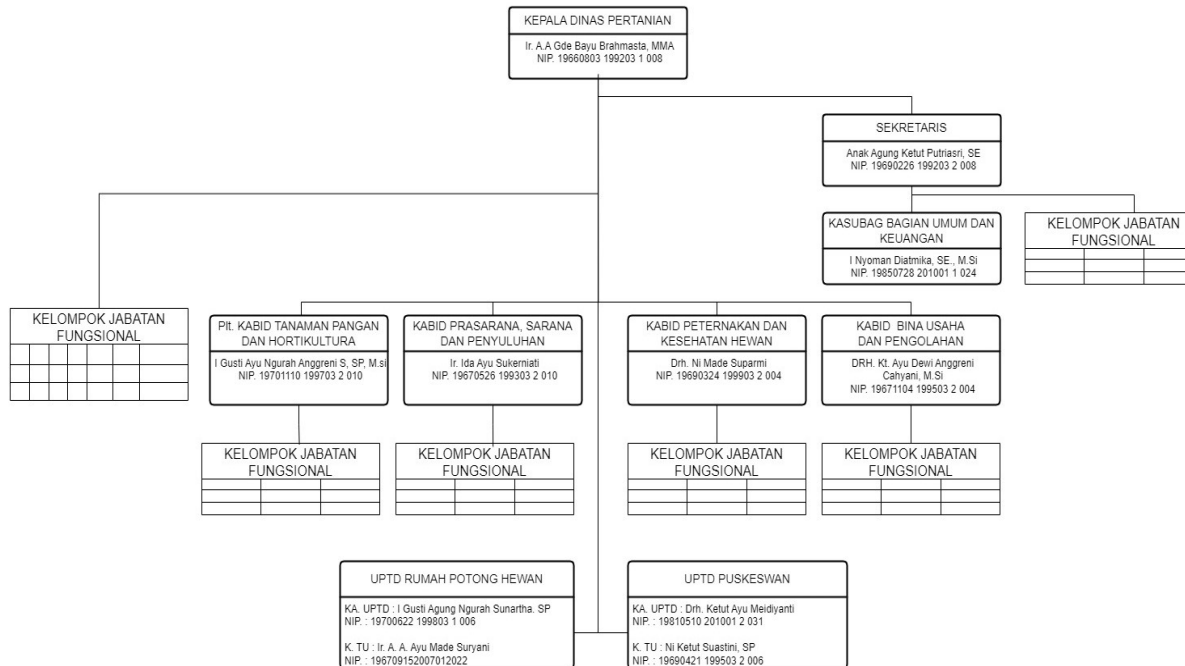
Dinas Pertanian terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura; Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan; Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Bina Usaha dan Pengolahan; Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pertanian Kota Denpasar disajikan pada **Tabel 1.**

TABEL 1. PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI SERTA
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR



Terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar, sangat dipengaruhi kinerja para sumber daya aparaturnya. Salah satu kinerja aparatur dapat dilihat dari disiplin kehadiran jam kerja aparatur. Disiplin kehadiran aparatur dapat dilihat pada tabel dan grafik a dan b di bawah ini.

Rekapitulasi Absensi Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025

No	Name	Jabatan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Ir. ANAK AGUNG GDE BAYU BRAHMASTA, MMA	Kepala Dinas, Dinas Pertanian Kota Denpasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	LUH KETUT AYU SUKARMI, SP	Penyuluh Pertanian Madya	0	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Drh. NI MADE SUPARMI	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	1	0	481	0	1	0	26	0
4	ANAK AGUNG KETUT PUTRIASRI, SE	Sekretaris	298	0	119	0	0	0	242	215	260	270	2	107
5	IDA BAGUS MADE ARI CHANDRA GOPTA, SP.,M.Si	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	I GUSTI AYU NGURAH ANGGRENI SUWARI, SP, M.Si	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	NI KETUT SARI DEWI, STP	Perencana Ahli Muda (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	RULLY FITRI SIANTI DEWI, S.Pt.	Penyuluh Pertanian Muda	431	0	272	0	0	0	0	0	0	0	29	0
9	I NYOMAN DIATMIKA, SE.,M.Si	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	239

10	I NYOMAN EDIATNA	Arsiparis Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11	Dewa Ayu Putu Ekayanti, SP.	Penelaah Teknis Kebijakan, Sebagai Plt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
12	NI PUTU PIPIT MERDEKAWATI, S.Kom	Perencana Ahli Pertama, Dinas Pertanian Kota Denpasar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IDA AYU AGUNG UPADIANTI JAYANTARI	Perencana Ahli Pertama	0	239	270	0	0	0	239	0	270	0	0	328	0
14	MUHAMMAD DAVID HERMAWAN, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	EKO DWININGSIH, S.P.	Penelaah Teknis Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	I KETUT PAHANG WIRATAMA	Penelaah Teknis Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297
17	NI WAYAN ANTARI, SP	Penelaah Teknis Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	NI WAYAN MURTINI, SP	Penelaah Teknis Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0
19	PUTU ARI FIRMASARI, S.Pt	Penelaah Teknis Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	P.DIANA KESUMA DEWI, S.TP	Penelaah Teknis Kebijakan	239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	NI NENGAH SURATMI, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	HABIB RACHMAD DARMANTO, S.Pt.	Penelaah Teknis Kebijakan	0	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0
23	AYU INDAH GUSTI J., S.P.	Pengawas Pupuk dan Pestisida	3	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0
24	NI KADEK DEWI SETIANINGSIH, S.E.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	189	106	0	0	0	478	109

25	PANDE NYOMAN PRADNYA ANANTA WISESA S.KOM	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	NI MADE AYU CITRA LAKSMI, S.P.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	WINDY KARTIKA SARI, S.M.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0
28	AGUS DARMA SAPUTRA, S.T	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	808	431	0	530	0
29	G. AGUNG PARAYISNU WIKRAMANA, S.P.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	GDE NUSHA SUPUTRA, S.P.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	KOMANG SASTRIKA PUTRA, S.P.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	I GEDE NGURAH SWARNA DWIJA INDRATANAYA, S.P.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0
33	ANAK AGUNG AYU DYAH ADNYASWARI, S.Ds.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	I PUTU PUTRA WIGUNA, S.P.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	I MADE GEDE WIDNYANA, S.TP	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	NI MADE ITA SERI UTAMI, S.TP	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
37	I GUSTI NGURAH BAGUS WIRAJAYA, S.E.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	I GUSTI KOMANG EDY SAPUTRA, SH	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	I PUTU MANIK RAHMA ADI PUTRA, S.M.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0

40	I KADEK DWI YOGYANTARA ARSA PUTRA, S.Pt	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	6	252	0	0	0	164
41	IDA AYU ADHISTANIA PIDADA, S.KH	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	I PUTU GEDE INDRA PRANATA, S.E.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	239	0	1	0
43	IDA AYU ARY PURNAMASARI, S.KH	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	295	257	0	0	0
44	I NYOMAN MARIANA, S.S.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	ANAK AGUNG NGURAH AGUNG PARIARTHA PUTRA, S.H.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	NI WAYAN YULIARINI ASTARI, SE	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	NI PUTU NOVITA WIDYANTARI, S.Si.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	ANAK AGUNG SAGUNG KENCANA DEWI, S.E.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	I MADE PRAWIRA ARIA RAHARJA, S.E.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	I MADE DEDY SUMADHI, S.E	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	I MADE KUSUMA ARTA, S.H.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	GEDE ARSA SRI WIDASMA, S.P.	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	I KADEK DWI JAYA WARSA WARDHANA, SE	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1288	0
54	I GUSTI NGURAH ADYAKSA PRAMANA, S.Ak	Penata Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928	0
55	IRFAN SAPUTRA, A.Md. Pms.	Pengelola Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56	ANAK AGUNG NGURAH PARAMAYUDA, A.MD	Pengelola Layanan Operasional	0	0	0	0	0	0	0	275	239	525	250	24
57	MUKSAN	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	0	0	0	239	0	0	328	0	0	0
58	NI NYOMAN MASTINI	Pengadministrasi Perkantoran	239	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
59	I NYOMAN MANTRA	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	164	3	0	239
60	NI LUH GEDE WAHYUNI	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	I NENGAH SUARTIKA, SP	S t a f, Dinas Pertanian Kota Denpasar	0	0	0	0	0	0	18	10	240	1203	0	0
62	I MADE SUARTHA	Pengadministrasi Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah (orang)			5	3	4	0	1	2	6	11	11	5	12	8
Jumlah (menit)			1210	822	662	0	1	241	1175	2673	2668	2002	4114	1180



Grafik a. Disiplin Absensi Pegawai berdasarkan Jam Keterlambatan (Menit)



Grafik b. Disiplin Absensi Pegawai berdasarkan Jumlah Pegawai (orang)

Dari data rekapitulasi absensi dan grafik kehadiran pegawai Dinas Pertanian Kota Denpasar dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025 (grafik a dan b), dapat dilihat bahwa disiplin pegawai baik dari segi volume keterlambatan maupun jumlah pegawai yang terlambat, fluktuatif namun kecenderungan mengalami penurunan. Dari grafik a Absensi Pegawai berdasarkan Jam Keterlambatan (Menit) angka tertinggi pada Bulan Nopember, disusul pada Bulan Agustus dan Bulan September agak tinggi. Pada bulan selain bulan itu jumlah waktu keterlambatan pegawai cenderung mengalami penurunan, terlihat dari Bulan Nopember ke Bulan Desember turun drastis. Ini menunjukkan kecenderungan menurunnya angka pelanggaran disiplin pegawai.

Begitu juga halnya dengan grafik b, dari segi jumlah pegawai yang terlambat dari Bulan Januari 2025 sampai dengan Bulan Desember 2025 angkanya cenderung mengalami penurunan. Hanya sempat agak tinggi di Bulan Agustus, September dan Desember, tetapi cenderung menurun. Ini menunjukkan kecenderungan menurunnya angka pelanggaran disiplin pegawai.

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas kinerja ini merupakan gambaran pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja ini dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Adapun sistematika penulisan laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan susunan sebagai berikut :

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi. Bab I terdiri dari : Latar Belakang, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum, Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, serta menggambarkan keselarasan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra (Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target 5 tahun), Renja (Sasaran, Indikator dan target Tahun Berjalan) dan Perjanjian Kinerja (target Renja yang diperjanjikan setiap awal tahun). Bab II terdiri dari Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja.

Dengan gambaran :

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang pada Renstra.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran :

Dilampirkan Perjanjian Kinerja 2025 dan IKU 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Pertanian Kota Denpasar merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Denpasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2023 Dinas Daerah Tanggal 26 Oktober 2023. Sebagai sebuah OPD, mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain isinya menyatakan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar Periode Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021 – 2026 (Perda Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 5 Agustus 2021). Selain itu, juga mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Bali dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2025 – 2029, sehingga diharapkan adanya sinergitas kebijakan, program dan kegiatan. Selanjutnya Renstra ini merupakan dokumen yang dapat menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dan pihak-pihak lainnya untuk menyusun rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sekaligus sebagai arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi dan misi dinas. Matrix Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Denpasar dapat dilihat pada **Lampiran 1 dan 2**.

A. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Dengan mengacu pada potensi peluang pemanfaatan sumber daya pertanian, masalah dan hambatan serta kecenderungan lingkungan strategis yang berpengaruh di Kota Denpasar, maka Dinas Pertanian Kota Denpasar mengacu pada Visi Walikota Denpasar dalam RPJMD Periode 2021-2026 adalah “**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**”. Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor : 5 Tahun 2021 tertanggal 25 Agustus 2021 tentang RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Dan untuk dapat mencapai visi tersebut, ada 5 misi sebagai cermin angan-angan/keinginan yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan.
2. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana.
3. Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
4. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali.

Dari 5 misi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Denpasar maka Dinas Pertanian mendukung menjalankan misi ke 2 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu “**Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana**”, terutama pada point Ketahanan Pangan terkait produksi komoditas pertanian.

B. Tujuan

Tujuan adalah menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Misi ke-2 yang diampu Dinas Pertanian mempunyai 3 (tiga) tujuan yaitu : a.

Meningkatkan pengendalian terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Mewujudkan ketahanan pangan. c. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

Sejalan dengan visi dan misi, tujuan pembangunan pertanian yang telah dirumuskan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar periode 2021-

2026 adalah : ***Mewujudkan Ketahanan Pangan, dengan sasaran Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan.***

C. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan dan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu. Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sesuai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar, pembangunan pertanian pada lima tahun ke depan (periode 2021 – 2026). Berdasarkan Perwali No 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah, secara lebih spesifik dan fokus dapat dijabarkan bahwa ***tujuan Dinas Pertanian*** sesuai tugas pokok dan fungsi adalah ***Meningkatkan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produktifitas, Daya Saing Komoditas Pertanian serta Kesejahteraan Petani, dengan sasaran :***

1. Meningkatnya produksi pertanian
2. Meningkatnya Usaha Kelompok Tani yang Berwawasan Agribisnis
3. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Produksi Ternak dan Produknya.

Tetapi berdasarkan Perwali Nomor 38 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 56 Tahun 2021, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar Periode 2021-2026 mengalami rervisi (Review) terhadap sasaran dan indikatornya. Sasarannya menjadi :

1. **Meningkatnya pendapatan petani.**
2. **Meningkatnya pendapatan peternak.**

Tabel 2.1. Penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,790	1,795	1,800	1,805	1,808
		Meningkatnya pendapatan peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,300	1,310	1,320	1,330	1,375
			Cakupan derajat kesehatan hewan ternak (kekebalan kelompok)	80%	80%	80%	80%	91,2%

Dari visi ke 2 Walikota Denpasar, tujuan Dinas Pertanian dibentuk adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan dua sasaran yaitu meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan pendapatan peternak, dengan 3 indikator seperti pada tabel di atas (Tabel 2.1.). Target indikator Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak pada Tahun 2024 tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen Renstra Dinas Pertanian karena capaian pada Tahun 2023 sebesar 1,340 dari Target 1.320, sehingga target Tahun 2024 setingkat lebih tinggi dari Tahun 2023 menjadi 1,350.

Demikian juga halnya dengan target Tahun 2025, menyesuaikan dengan capaian kinerja Tahun 2024. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, adalah dengan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan secara optimal. Dinas Petanian Kota Denpasar selanjutnya menuangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tabel 2.2. Penjabaran Tujuan, Sasaran dan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Mewujudkan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	Angka	1,808
		Meningkatnya pendapatan peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	Angka	1,375
			Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	Prosentase	91,20%

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan (Tahun 2025)

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan
Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	Angka
Meningkatnya pendapatan peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	Angka
	Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	Prosentase

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Penetapan kinerja pada hakekatnya adalah suatu dokumen pernyataan komitmen / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja yang mempresentasikan tekad dan janji antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang pertanian di Kota Denpasar. Penetapan Kinerja Tahun

2025 pada Dinas Pertanian Kota Denpasar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas, mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 3**, dan Pernyataan Penetapan Kinerja antara Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar beserta lampiran penetapan kinerja Tahun 2025 disajikan pada **lampiran 4 dan 5**.

Sesuai dengan review Renstra Dinas Pertanian pada Triwulan III Tahun 2022, dukungan kebijakan penganggaran dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Target Indikator Kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 terkait dengan pencapaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
Meningkatkan Pendapatan Petani	1. Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,808	7.489.570.600,-
Meningkatkan Pendapatan Peternak	2. Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,375	1.300.822.000,-
	3. Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	91,20%	862.156.820,-

Selain alokasi penganggaran program-program yang bersifat teknis tersebut di atas (seperti dalam table 2.4.), Dinas Pertanian juga menganggarkan program pendukung yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang sangat berpengaruh pada capaian program-program teknis tersebut dengan alokasi anggaran Rp.16.897.129.096,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Denpasar periode 2021 – 2026 telah ditetapkan pada Bulan September 2021 berdasarkan Perwali Nomor 56 Tahun 2021, dan dalam perjalanannya dilakukan perubahan / review pada Bulan September Tahun 2022 berdasarkan Perwali Nomor 38 Tahun 2022. Perubahan ini sangat terkait dengan perubahan sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Denpasar yang mengalami perubahan signifikan.

Setelah dilakukan review, sasaran strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pertanian beserta target Tahun 2025 seperti pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pertanian beserta target Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,808
2.	Meningkatnya pendapatan peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,375
		Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	91,20%

Dalam pembahasan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025, akan dibahas IKU Dinas Pertanian setelah review.

3.1. Capaian Kinerja Dinas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar dan Rencana Strategis Dinas Pertanian Periode Tahun 2021 – 2026 menjadi acuan pada penetapan indikator kinerja dinas. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas sesuai tugas pokok dan fungsi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pendapatan petani / usahatani adalah keuntungan usahatani yang diperoleh dari penerimaan total yang merupakan perkalian antara produksi dengan harga jual dikurangi dengan biaya total yang dikeluarkan petani yang dihitung dalam satuan rupiah. Pendapatan petani biasanya dihitung adalah pendapatan petani per hektar / tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan petani antara lain faktor internal; bantuan dari pemerintah maupun swasta sehingga petani dapat meningkatkan efisiensi peralatan, pupuk maupun tenaga kerja meskipun dengan luas lahan yang sama. Faktor eksternal; harga saat penjualan dan kualitas produk saat penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa, petani dapat meningkatkan produksi yang juga akan meningkatkan pendapatan petani.

Implementasi dari keinginan untuk mencapai sasaran ini, pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam Tahun 2025 melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 26 subkegiatan dengan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pengukuran pencapaian kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Apabila **semakin besar realisasi** menunjukkan **kinerja yang semakin baik** atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, digunakan rumus:

$$capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila **semakin besar realisasi** menunjukkan **kinerja yang semakin buruk** atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik, digunakan rumus :

$$capaian = \frac{(2 \times Target) - Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Atau

$$= \frac{Rencana - (Rencana - Realisasi)}{Rencana} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan pencapaian kinerja, dilakukan evaluasi / analisis terhadap pencapaian setiap indicator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar

diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan dimasa yang akan datang.

Pengukuran capaian kinerja dengan indikatornya terangkum dalam beberapa sasaran yang ingin dicapai dengan beberapa indikator kinerja sasaran. Realisasi pencapaian sasaran pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Denpasar pada Tahun 2025 diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

3.1.1. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani

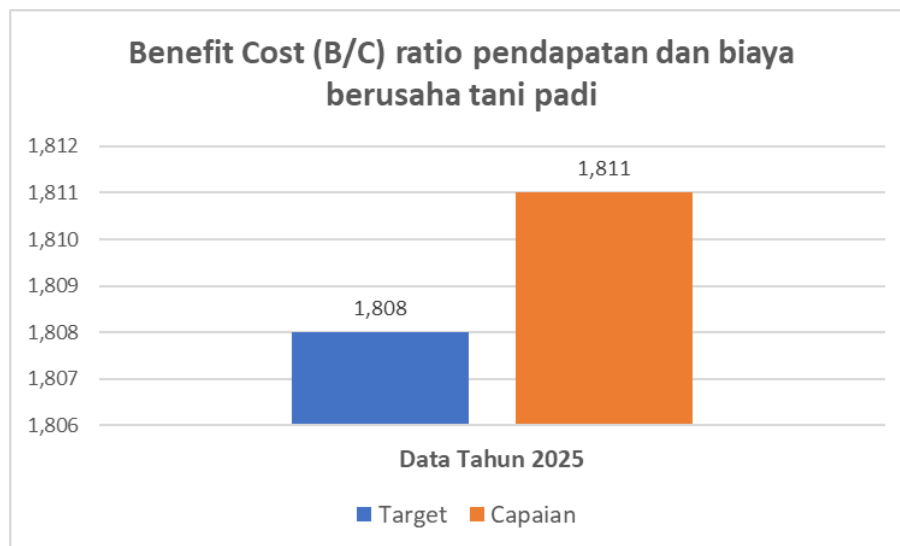
Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani ada 1 (satu) yaitu Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi. Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran ini ada 4 (empat) yaitu : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian.

Suatu ukuran perbandingan antara pendapatan penjualan dengan total biaya produksi berusaha tani padi dimana B adalah benefit (total penjualan) dan C adalah cost (biaya produksi). Semakin tinggi B/C ratio, maka semakin layak diusahakan/pendapatan semakin tinggi.

a. Capaian kinerja Tahun 2025

Tabel 3.2. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani dengan indikator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi

No.	Indikator kinerja	Target	Capaian	(%)
1.	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,808	1,811	100,17%



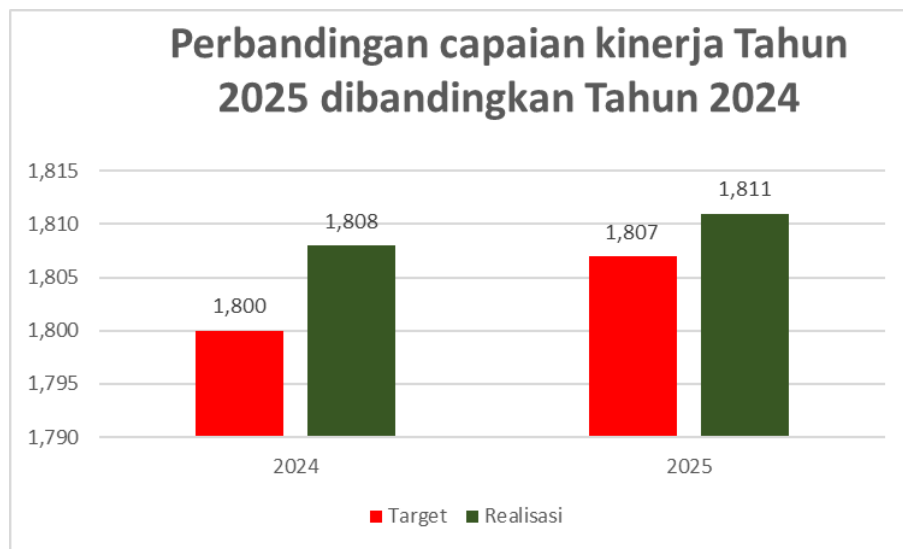
Grafik 3.1. Capaian kinerja dari target tahun 2025 dari sasaran Meningkatkan Pendapatan Petani dengan indikator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi

Indikator kinerja sasaran Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi dengan target 1,800 hasil / capaiannya pada Tahun 2025 adalah 1,811 (100,17%) yang berarti capaian kinerja sudah memenuhi bahkan melampaui target. Capaian ini berarti bahwa antara pendapatan / total penjualan produksi gabah per hektar dibandingkan dengan total biaya produksi berusaha tani padi satu hektar, menghasilkan rasio 1,811 atau hampir 2 (total hasil penjualan 1,811 / satu koma delapan satu satu) kali total biaya produksi. Angka ini lebih tinggi dari target, dimana semakin tinggi B/C ratio, maka semakin layak diusahakan/pendapatan semakin tinggi.

b. Capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024

Tabel 3.3. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,800	1,807	100,39%	1,808	1,811	100,17%



Grafik 3.2. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian tahun 2024 dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani dengan indicator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani dengan indikator Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi Tahun 2025 adalah 1,811. Capaian Tahun 2024 adalah 1,807. Terlihat bahwa pencapaian Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 dan juga di atas target. Ini berarti pendapatan petani

dari berusaha tani padi pada tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan pendapatan berusaha tani padi pada Tahun 2024.

B/C Ratio sangat terkait dengan adanya perubahan harga jual gabah, biaya produksi maupun hasil / produksi gabah per hektar (produktivitas). Sebagian besar gabah di Kota Denpasar dibeli oleh pihak penebas, dan harga gabah per “are” nya ditentukan oleh Penebas. Jadi terkait naiknya B/C ratio di Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024, dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah naiknya harga gabah dan naiknya produktifitas padi. Pada kondisi Tahun 2025, harga gabah di Kota Denpasar naik signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh berperannya Bulog dalam membeli gabah petani dengan harga cukup tinggi (Rp.6.500 per kilogram) sehingga berdampak pada harga gabah secara umum di Kota Denpasar.

c. Membandingkan capaian kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	NA	1,790	1,795	1,800	1,808	NA	1,930	1,800	1,807	1,811



Grafik 3.3. Capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan capaian kinerja beberapa tahun terakhir dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani dengan indicator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi.

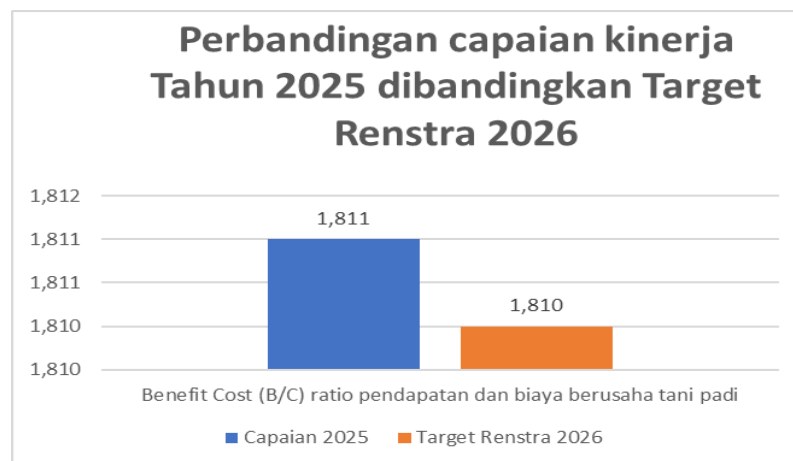
Dari tabel dan grafik di atas dapat diuraikan bahwa Tahun 2021 tidak tersedia data karena Tahun 2021 Indikator Kinerja Dinas belum menggunakan B/C Rasio. Pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani dengan indicator sasaran Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi, selalu di atas target. Pencapaian tertinggi adalah pada Tahun 2022 yang dikarenakan harga gabah yang sangat tinggi saat itu. Kalau dilihat dari Tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan capaian kinerja B/C Ratio Berusaha Tani Padi. Dua komponen yang sangat menentukan capaian ini adalah produktifitas padi dan harga gabah. Pada Tahun 2025 produktifitas padi meningkat dibandingkan Tahun 2024 (dari 79,19 kw/ha menjadi 79,44 kw/ha) seiring dengan peningkatan capaian B/C Ratio Berusaha Tani Padi.

d. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target Jangka Menengah (Akhir Periode Renstra 2026)

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani dengan indikator kinerja Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi Tahun 2025 mencapai progress di atas target yang ditetapkan dalam Renstra. Pencapaian target sampai dengan Tahun 2025 ini dibandingkan terhadap pencapaian target jangka menengah akhir periode Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar yaitu pada Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Capaian kinerja sasaran sampai dengan Tahun 2025 dibandingkan Target Renstra 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,811	1,810	100,05%



Grafik 3.4. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir renstra (tahun 2026) dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani dengan indicator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi

Melihat capaian kinerja indicator sasaran Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi sampai dengan Tahun 2025 dibandingkan dengan target capaian akhir Tahun Renstra 2026, maka dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2026 yaitu 1,810 sudah tercapai di Tahun 2025. Pada Tahun 2022 yang merupakan awal periode Renstra, tercapai di atas target akhir periode Renstra sedangkan pada Tahun 2023 pencapaiannya minus 0,010 point, pada Tahun 2024 pencapaiannya minus 0,03 point dan pada Tahun 2025 pencapaiannya naik sebesar 0,04 point. Pada indicator sasaran ini, capaian realisasi yang semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi / baik. Peran semua komponen yang terkait dengan capaian indikator dalam sasaran ini dalam melaksanakan program kegiatan sangat tinggi.

e. Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Capaian Kabupaten di Bali atau Propinsi Bali

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani dengan indicator kinerja Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi, Tahun 2025 pencapaiannya di atas target yang ditetapkan. Pencapaian ini belum bisa dibandingkan dengan kabupaten / daerah lainnya di Propinsi Bali karena indikator ini spesifik dan tidak dipakai oleh kabupaten / daerah lainnya.

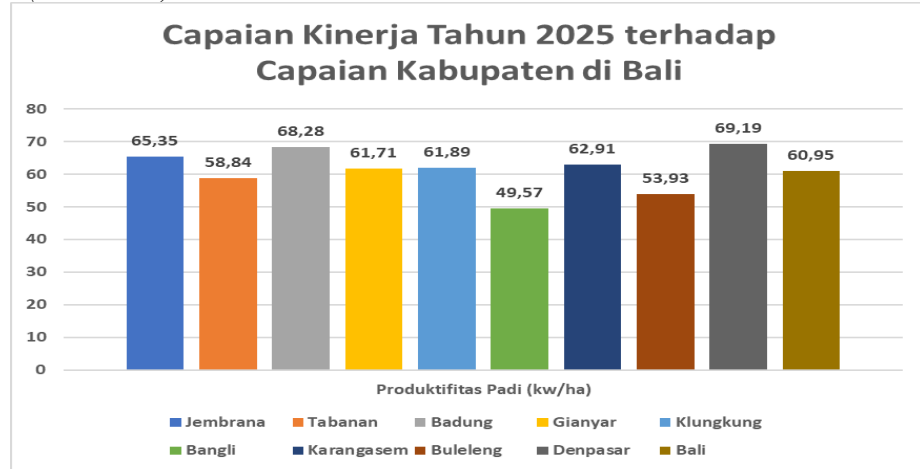
Namun jika dibandingkan antar komponen yang membentuk nilai B/C Ratio itu sendiri, salah satu komponen itu adalah produksi padi per satuan luas panen 1 (satu) hektar atau disebut produktifitas padi, akan diperoleh perbandingan yang dapat menggambarkan capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani dengan indikator B/C Ratio berusaha tani padi. Capaian produktifitas padi Kota Denpasar

dibandingkan dengan daerah / kabupaten lain di Propinsi Bali dapat dilihat pada tabel 3.6. di bawah ini.

Tabel 3.6. Capaian produktifitas padi Kota Denpasar dibandingkan dengan daerah / kabupaten lain di Propinsi Bali Tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota / Propinsi	Produktifitas Padi (kw/ha)	Ranking	Keterangan
1.	Jembrana	65,35	3	
2.	Tabanan	58,84	7	
3.	Badung	68,28	2	
4.	Gianyar	61,71	6	
5.	Klungkung	61,89	5	
6.	Bangli	49,57	9	Terendah
7.	Karangasem	62,91	4	
8.	Buleleng	53,93	8	
9.	Denpasar	69,19	1	Tertinggi
10.	Bali	60,95		

Sumber data : Aplikasi SiPDPS Pusdatin Kementan RI Tahun 2026 (sementara)



Grafik 3.5. Capaian komponen kinerja pembentuk B/C Ratio berusaha tani padi (produktifitas padi) Tahun 2025 dibandingkan dengan kabupaten sepropinsi Bali dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Petani dengan indicator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi

Dari angka pada tabel dan grafik tersebut di atas, dapat dilihat bahwa capaian produktifitas padi Kota Denpasar Tahun 2025 sebagai komponen yang membentuk B/C Ratio berusaha tani padi, capaian Kota Denpasar adalah yang tertinggi yaitu 69,19 kwintal per hektar dan juga sangat signifikan lebih tinggi dari capaian Propinsi Bali yaitu 60,95 kwintal per hektar. Capaian ini bisa dipakai gambaran pencapaian B/C Ratio berusaha tani padi, dengan asumsi komponen lain pembentuk B/C Ratio itu sendiri adalah sama.

f. Analisis penyebab peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Indicator sasaran meningkatnya pendapatan petani yaitu indicator kinerja Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi, Tahun 2025 menghasilkan capaian kinerja di atas target yaitu 1,811 dari target 1,808. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi pencapaian kinerja B/C Ratio Berusaha Tani Padi Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yg Dilakukan
1.	Meningkatnya pendapatan petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	1,808	1,811	100,39 %	Keberhasilan pencapaian indikator kinerja di atas target dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain sejak Tahun 2025 Bulog membeli gabah petani dengan harga tinggi (Rp.6.500 per kilogram), sehingga mempengaruhi harga pasar gabah yang semakin tinggi, permintaan meningkat karena terjadinya kekeringan di Pulau Jawa.	Mempertahankan bahkan meningkatkan terus capaian indikator kinerja

Semakin tinggi B/C ratio, maka semakin layak diusahakan/pendapatan petani semakin tinggi. Pencapaian B/C Ratio

berusaha tani padi pada Tahun 2025 ini melampaui target yang ditetapkan, dan sangat berkaitan dengan pencapaian produktifitas padi dan harga jual gabah. Produktifitas padi Kota Denpasar pada Tahun 2025 mencapai 69,19 kw/ha (sumber data tertera pada tabel di atas). Pencapaian ini juga tertinggi dibandingkan dengan kabupaten se Propinsi Bali. Namun fluktuasi harga gabah sangat variatif dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas gabah serta permintaan. Kebijakan dan regulasi yang diambil pemerintah melalui Dinas Pertanian Kota Denpasar sangat mendukung upaya-upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kalau dilihat dari pendapatan berusaha tani (padi) di Kota Denpasar cukup menguntungkan (layak), namun kepemilikan lahan sawah yang sempit / kecil menjadi kendala dimana sebagian besar petani di Kota Denpasar terkatagori petani gurem (kepemilikan lahan di bawah 0,5 hektar).

g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran)

Tabel 3.8. Efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) atas pencapaian B/C Ratio Berusaha Tani Padi Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya pendapatan petani	1,808	1,811	100,17 %	7.489.570.600	7.054.938.242	94,20%	5,80 %

Sasaran meningkatnya pendapatan petani yang mengampu 1 (satu) indikator kinerja yaitu Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi didukung 4 (empat) program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan alokasi dana Rp. 1.178.203.500,-; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 1

kegiatan dan 2 sub kegiatan alokasi dana Rp. 5.489.983.600,-; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan alokasi dana Rp. 265.169.000,- dan Program Penyuluhan Pertanian dengan 1 kegiatan dan 3 subkegiatan alokasi dana Rp.556.214.500,-; total alokasi dana yang mendukung indikator sasaran ini adalah Rp. 7.489.570.600,-. Total penyerapan anggaran adalah Rp. 7.054.938.242,- atau 94,20%. Karena capaian kinerja melebihi 100% (100,17%) maka dapat dikatakan terjadi efisiensi penggunaan anggaran mencapai 5,80% (Rp. 434.632.358,-).

h. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.9. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Pendapatan Petani	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi	100,17 %	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	Padi 110,48% Sayur ijo 102,71% Kangkung 102,36,06% Bayam 102,94% Semangka 105,53% Ternak 78,33%	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100%	Menunjang
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	88,12%	Menunjang
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	225%	Menunjang

				Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	200%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun , direhabilitasi dan di pelihara	500%	Menunjang
				Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Prosentase Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di Bawah Standar Nasional	50%	Menunjang
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase serangan OPT	- Tanaman Pangan (160)% - Horti 194,16%	Menunjang
				Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	178,5%	Menunjang
				Program Penyuluhan Pertanian	Peningkatan / Penguakuan Kelas Kelompok Tani	105,60%	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah kelompok tani	100%	Menunjang

				Penyuluhan Pertanian	yang meningkat pengetahuannya tentang pertanian		
				Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	Menunjang

Sasaran meningkatnya pendapatan petani yang mengampu 1 (satu) indicator kinerja yaitu Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi didukung 4 (empat) program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan 1 kegiatan / sub kegiatan dan Program Penyuluhan Pertanian dengan 1 kegiatan dan 3 subkegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi pada Tahun 2025 tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian yang mengeksekusi / melaksanakan program dan kegiatan yang nyata berpihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat khususnya petani, seperti : penyediaan benih unggul, penyediaan teknologi presisi (tepat guna) sesuai kebutuhan di lapangan, pemupukan berimbang, penyediaan jalan usaha tani (JUT) dan jaringan irigasi usaha tani (JIUT) terkait penyediaan akses mobilisasi / fasilitasi berusaha tani dan penyuluhan-penyuluhan pemberdayaan petani terkait penerapan teknologi presisi (sistem pertanian yang mengintegrasikan strategi manajemen dan teknologi yang mengefisienkan penggunaan sumber daya untuk mendapatkan hasil maksimal dan mengurangi dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan) sehingga petani menjadi semakin maju.

Tabel 3.10. Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.178.203.500	1.036.568.713	87,98
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.178.203.500	293.082.665	87,98
	Sub Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	379.839.000	597.015.154	77,16

	Sub Kegiatan : Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	798.364.500	743.486.048	93,13
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.489.983.600	5.270.130.556	96,00
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	5.489.983.600	5.270.130.556	96,00
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pembangunan Prasarana Pertanian	703.595.000	674.024.151	95,80
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.786.388.600	4.596.106.405	96,02
3.	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	265.169.000	222.382.259	83,86
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	265.169.000	222.382.259	83,86
	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	265.169.000	222.382.259	83,86
4.	Program Penyuluhan Pertanian	556.214.500	525.856.714	94,54
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	556.214.500	525.856.714	94,54
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	402.014.000	375.023.892	93,29
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	63.000.500	62.482.822	99,18
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	91.200.000	88.350.000	96,88
J u m l a h		7.489.570.600	7.054.938.242	94,20

Sasaran meningkatnya pendapatan petani yang mengampu 1 (satu) indikator kinerja yaitu Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi didukung 4 (empat) program yaitu 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan alokasi dana Rp. 1.178.203.500,- dengan realisasi Rp. 1.036.568.713,- (87,98%); Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan alokasi dana Rp. 5.489.983.600,- dengan realisasi Rp. 5.270.130.556,- (96,00%); Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan alokasi dana Rp. 265.169.000,- dengan realisasi Rp. 222.382.259,- (83,86%) dan Program Penyuluhan Pertanian dengan 1 kegiatan dan 3 subkegiatan alokasi dana Rp.556.214.500,- dengan realisasi Rp.525.856.714,- (94,54%). Total pagu yang teralokasi untuk keberhasilan pencapaian kinerja Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi pada Tahun 2025 adalah Rp. 7.489.570.600,- dan terealisasi Rp. 7.054.938.242,- (94,20%). Karena capaian kinerja melebihi 100% (100,17%) maka dapat dikatakan terjadi efisiensi penggunaan anggaran mencapai 5,80% (Rp. 434.632.358,-)

3.1.2. Sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak

Indikator kinerja pada sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak ada 2 (dua) yaitu Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak, dan cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok). Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran ini ada 3 (tiga) yaitu : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan 1 (satu) kegiatan / subkegiatan; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 1 (satu) kegiatan / subkegiatan; Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan 3 (tiga) kegiatan/subkegiatan.

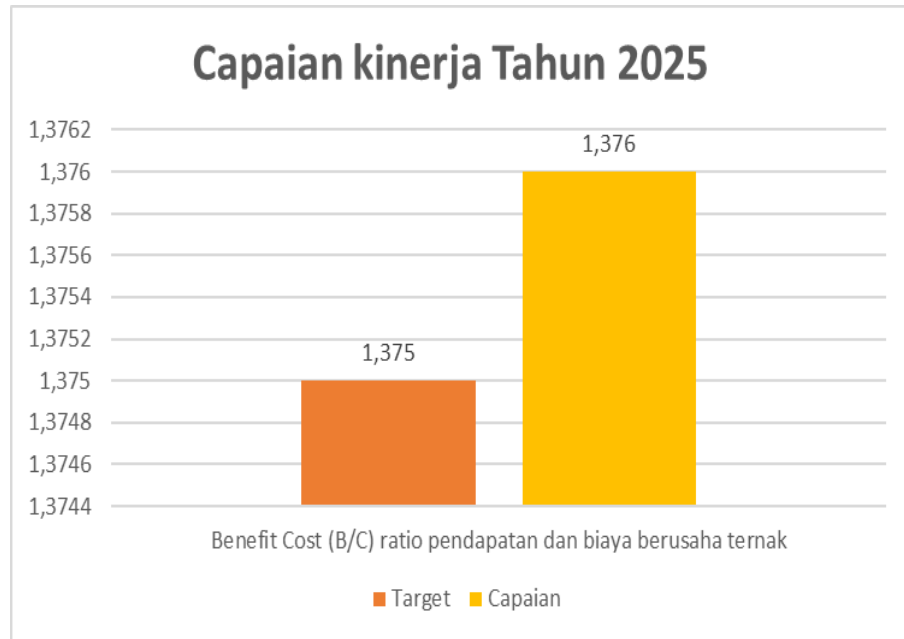
Suatu ukuran perbandingan antara total pendapatan (penjualan) dengan total biaya produksi berusaha ternak dimana B adalah benefit (total penjualan) dan C adalah cost (biaya produksi). Semakin tinggi B/C ratio, maka semakin layak diusahakan/pendapatan semakin tinggi.

Di lain sisi, dalam rangka mempertahankan suatu wilayah terbebas dari satu penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan penyakit zoonosis diperlukan langkah pengendalian dan penanggulangan berupa vaksinasi dengan cakupan minimal 80% dari populasi (herd immunity) dan langkah biosecurity (sanitasi hygiene). Semakin tinggi derajat kesehatan hewan / ternak akan berdampak terhadap kualitas dan kuantitas ternak yang akan berpengaruh terhadap pendapatan peternak.

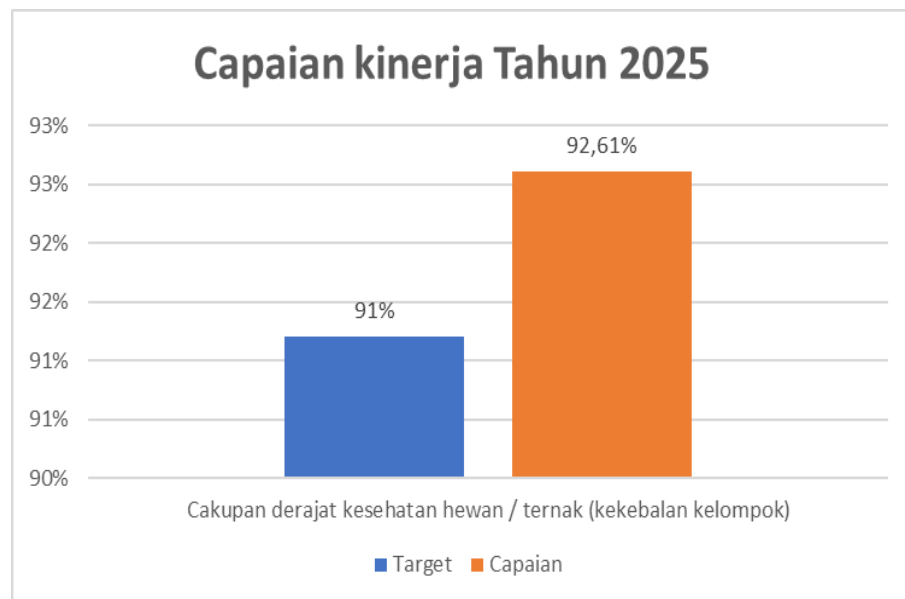
a. Capaian kinerja Tahun 2025

Tabel 3.11. Capaian kinerja sasaran *Meningkatnya Pendapatan Peternak* dengan indikator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak dan Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok).

No.	Indikator kinerja	Target	Capaian	(%)
1.	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,375	1,376	100,07%
2.	Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	91,20%	92,61%	101,55%



Grafik 3.6. Capaian kinerja dari target tahun 2025 dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak dengan indicator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak



Grafik 3.7. Capaian kinerja dari target tahun 2025 dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak dengan indicator sasaran : Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)

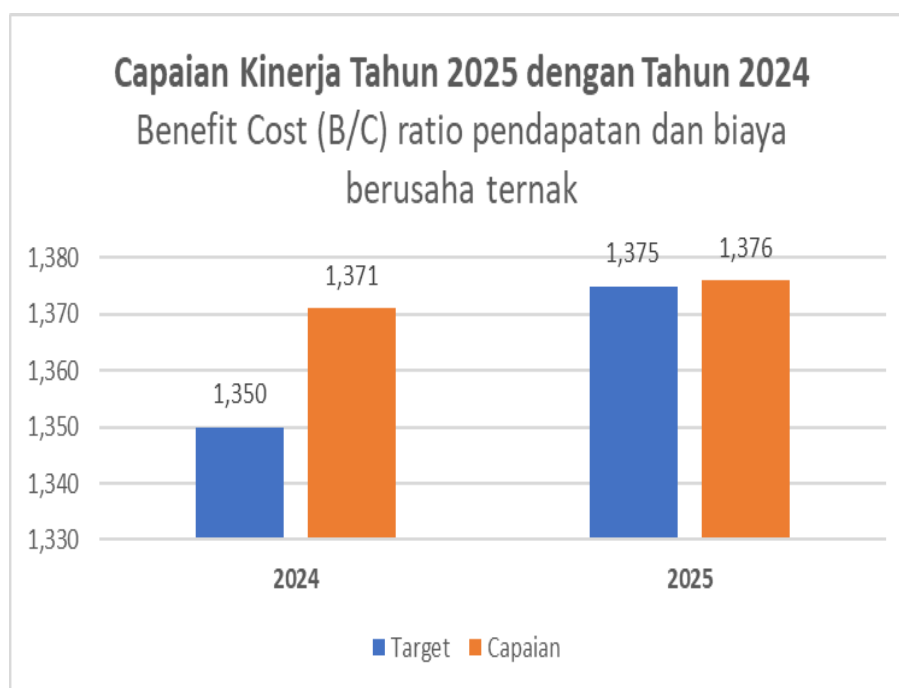
Indikator kinerja sasaran Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak dengan target 1,375 hasil / capaiannya pada Tahun 2025 adalah 1,376 (100,07%) yang berarti capaian kinerja sudah memenuhi bahkan melampaui target. Capaian ini berarti bahwa antara pendapatan / total penjualan produksi ternak dibandingkan dengan total biaya produksi ternak dalam setahun menghasilkan angka B/C ratio di atas 1 (satu) yang berarti usaha itu menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Semakin tinggi nilai B/C ratio, mengindikasikan pendapatan peternak semakin tinggi. Di sisi lain peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama dari angka 1,371 di Tahun 2024 menjadi 1,376 di Tahun 2025 disebabkan oleh naiknya harga babi di tingkat peternak yang disebabkan meningkatnya permintaan babi.

Sedangkan indikator kinerja sasaran cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok) dengan target 91,20%, hasil / capaiannya pada Tahun 2025 adalah 92,61% (101,55%) yang berarti capaian kinerja sudah memenuhi bahkan melampaui target. Hal ini mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan ternaknya meningkat. Capaian ini berarti bahwa cakupan kekebalan kelompok / herd immunity yang diperlukan untuk keamanan ternak / hewan dalam bertumbuh kembang minimal 80% sudah tercapai bahkan lebih (92,61%). Semakin tinggi derajat kesehatan hewan / ternak yang tercermin dari tingkat herd immunity, akan berdampak terhadap kualitas dan kuantitas ternak yang akan berpengaruh terhadap pendapatan peternak. Semakin tinggi nilai cakupan kekebalan kelompok, mengindikasikan ternak yang sehat dan dapat berkembang dengan baik yang akan berdampak pada pendapatan peternak yang semakin tinggi.

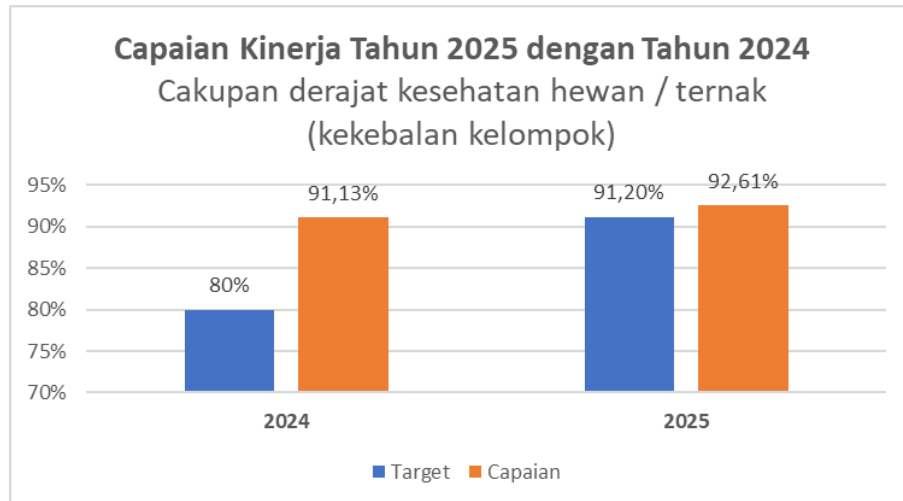
b. Capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024

Tabel 3.12. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran	Indikator kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya pendapatan peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,350	1,371	101,56%	1,375	1,376	100,07%
		Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	80%	91,13%	113,91%	91,20%	92,61%	101,55%



Grafik 3.8. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan capaian tahun 2024 dari sasaran Meningkatkan Pendapatan Peternak dengan indicator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak



Grafik 3.9. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024 dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak dengan indikator sasaran : Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)

Capaian kinerja sasaran meningkatkan pendapatan peternak dengan indikator Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak Tahun 2025 adalah 1,376. Terlihat bahwa pencapaian Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Tahun 2024, yang berarti pendapatan peternak lebih tinggi pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024. Peningkatan Capaian Indikator Kinerja Utama dari angka 1,371 di Tahun 2024 menjadi 1,376 di Tahun 2025 disebabkan oleh naiknya harga ternak babi (bibit) ditingkat peternak yang dikarenakan permintaan meningkat.

Di sisi lain capaian indikator sasaran cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok) Tahun 2025 juga lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Tahun 2024. Capaian pada Tahun 2024 adalah 91,13% sedangkan capaian pada Tahun 2025 adalah 92,61%. Peningkatan ini disebabkan oleh :

1. Pendataan Populasi anjing yang lebih akurat
2. Koordinasi dengan Desa / Kelurahan yang intens sehingga lebih banyak permasalahan yang bisa ditindaklanjuti

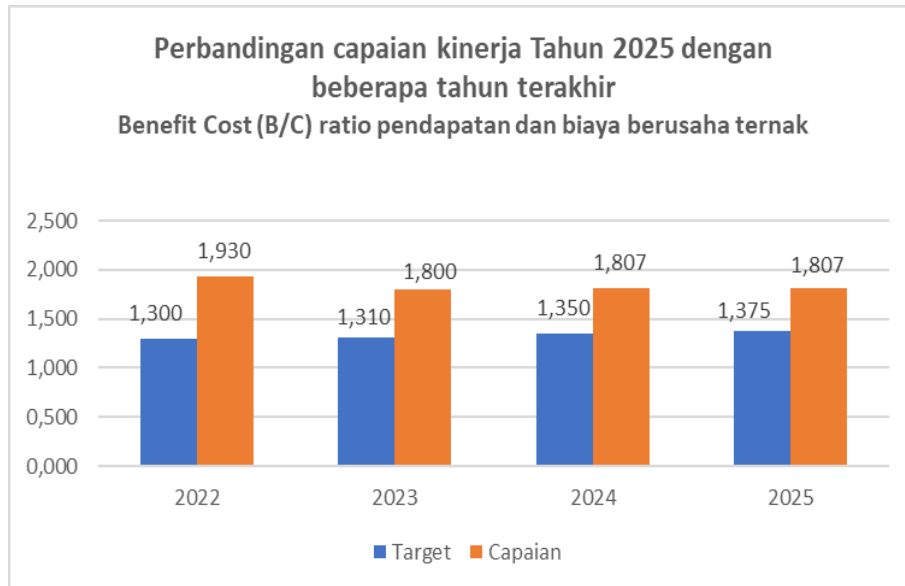
3. Peningkatan Kualitas SDM
4. Evaluasi dari setiap selesai kegiatan vaksinasi berlangsung

Kedua capaian yang baik ini juga sangat berkaitan dengan turunnya/ tidak adanya kasus / kejadian wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Tahun 2025 seperti yang terjadi pada Tahun 2022.

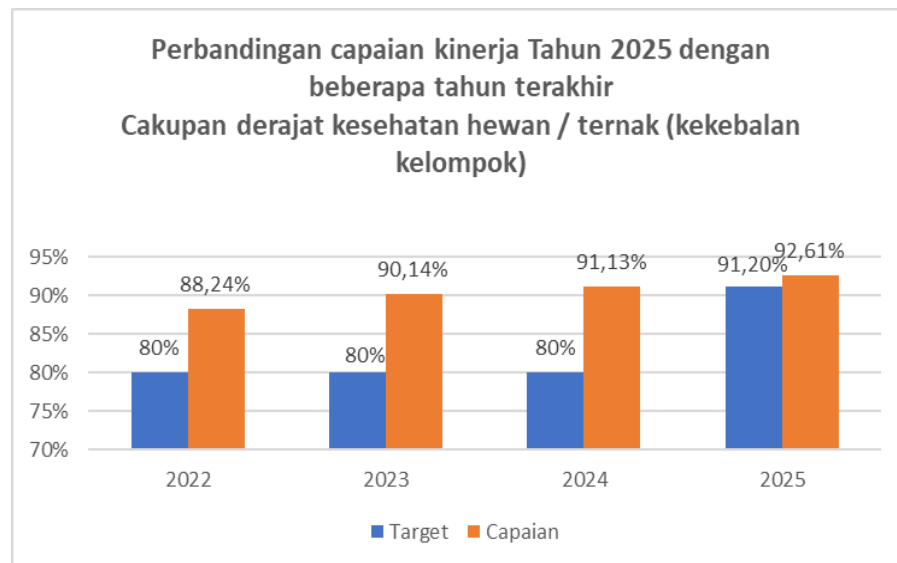
c. Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya pendapatan peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	NA	1,300	1,310	1,350	1,375	NA	1,390	1,340	1,371	1,376
	Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	NA	80%	80%	80%	91,20 %	NA	88,24 %	90,14 %	91,13 %	92,61 %



Grafik 3.10. Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Beberapa tahun Terakhir dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak dengan indicator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak.



Grafik 3.11 Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Beberapa tahun Terakhir dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak dengan indicator sasaran : Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok).

Dari tabel dan grafik di atas dapat diuraikan bahwa pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak dengan indicator sasaran Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak, selalu di atas target. Pencapaian tertinggi adalah pada Tahun 2022 yang dikarenakan harga jual ternak babi yang sangat tinggi sebagai akibat adanya wabah PMK yang menyerang ternak sapi. Kalau dilihat dari Tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan capaian kinerja B/C Ratio Berusaha Ternak dibandingkan tahun 2022, tapi tetap melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan capaian kinerja Tahun 2025 meningkat tipis dari capaian Tahun 2024 yaitu 0,005 dari 1,371 menjadi 1,376.

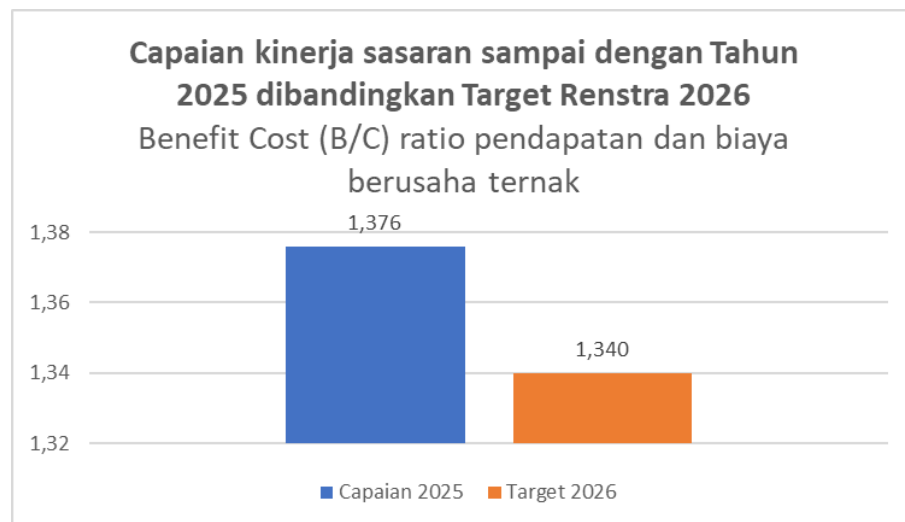
Di sisi lain pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kota Denpasar dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak dengan indicator sasaran cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok), terlihat cenderung meningkat setiap tahunnya dan selalu di atas target. Pencapaian tertinggi adalah pada Tahun 2025 yaitu 92,61%, yang disebabkan beberapa faktor antarlain dilaksanakannya vaksinasi secara berkala dan berkelanjutan dan keberadaan hewan semakin terdata dengan baik.

d. Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target Akhir Periode Renstra 2026

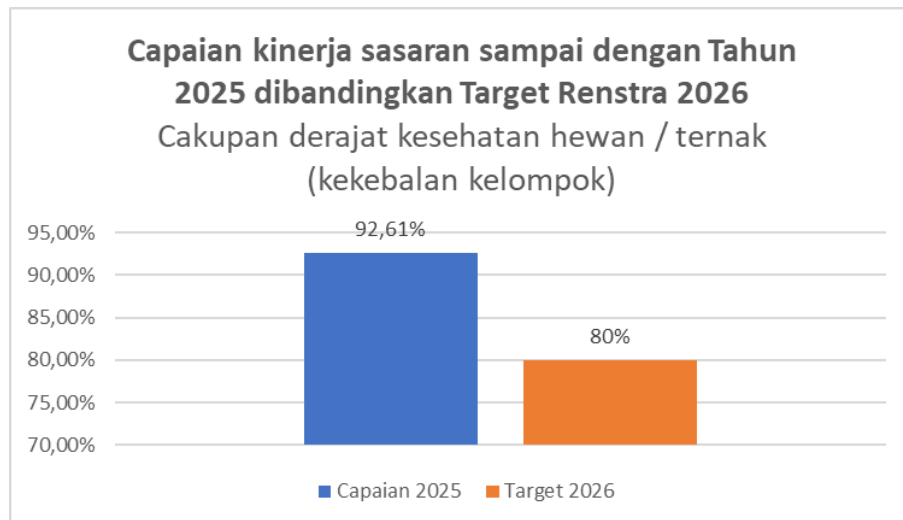
Capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani dengan indikator Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak Tahun 2025 mencapai progress di atas target yang ditetapkan dalam Renstra. Pencapaian target sampai dengan Tahun 2025 ini dibandingkan terhadap pencapaian target akhir periode Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar yaitu pada Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14. Capaian kinerja sasaran sampai dengan Tahun 2025 dibandingkan Target Renstra 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target 2026	Tingkat Kemajuan
2	Meningkatnya pendapatan peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	1,376	1,340	102,69%-
		Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	92,61%	80%	115,75%



Grafik 3.12. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir renstra (tahun 2026) dari sasaran Meningkatkan Pendapatan Peternak dengan indikator sasaran : Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak



Grafik 3.13. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan target akhir renstra dari sasaran Meningkatkan Pendapatan Peternak dengan indicator sasaran : Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)

Melihat capaian kinerja indicator sasaran Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak sampai dengan Tahun 2025 dibandingkan dengan target capaian akhir Tahun Renstra 2026, maka dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2026 yaitu 1,340 telah tercapai sejak Tahun 2022 yang merupakan awal periode Renstra dan juga Tahun 2023, Tahun 2024 serta Tahun 2025. Pada indicator sasaran ini, capaian realisasi yang semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi / baik. Peran semua komponen yang terkait dengan capaian indikator dalam sasaran ini dalam melaksanakan program kegiatan sangat tinggi.

Capaian kinerja indicator sasaran cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok) sampai dengan Tahun 2025 dibandingkan dengan target capaian akhir Tahun Renstra 2026, dapat disimpulkan bahwa target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2026 yaitu 80% (batas minimal cakupan kekebalan kelompok / herd immunity untuk terjaganya kesehatan ternak / hewan) telah tercapai sejak Tahun

2022, yang merupakan awal periode Renstra dan bahkan capaiannya meningkat pada Tahun 2023, Tahun 2024 serta Tahun 2025. Pada indikator sasaran ini, capaian realisasi yang semakin tinggi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin tinggi / baik dalam rangka keamanan dan kenyamanan beternak yang akan menjamin tumbuh kembang ternak dan akhirnya akan menentukan peningkatan pendapatan peternak.

e. Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Capaian Kabupaten di Bali atau Propinsi Bali

Capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan peternak dengan indikator kinerja Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak, Tahun 2025 pencapaiannya di atas target yang ditetapkan. Pencapaian ini belum bisa dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Propinsi Bali karena indikator ini tidak dipakai oleh semua kabupaten.

Berbeda halnya dengan B/C Ratio berusaha tani padi, untuk dapat membandingkan B/C Ratio berusaha ternak, sesuai data yang ada bahwa yang mempengaruhi B/C Ratio berusaha ternak adalah tingkat harga jual komoditas ternak (babi dan sapi, yang merupakan peternak mayoritas di Kota Denpasar). Sedangkan data harga jual di kabupaten sepropinsi Bali tidak tersedia data.

Yang bisa dibandingkan adalah salah satu indikator pencapaian sasaran meningkatnya pendapatan peternak yaitu cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok) sepropinsi Bali. Data cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok) sepropinsi Bali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Capaian Kabupaten di Bali

No.	Kabupaten / Kota / Propinsi	Cakupan vaksinasi (%)	Ranking	Keterangan
1.	Badung	84,58	5	
2.	Bangli	85,67	4	
3.	Buleleng	77,98	7	
4.	Denpasar	92,61	2	
5.	Gianyar	90,61	3	
6.	Jembrana	64,92	9	Terendah
7.	Karangasem	96,25	1	Tertinggi
8.	Klungkung	71,33	8	
9.	Tabanan	81,77	6	
10.	Bali	85,35		

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Bali Tahun 2026.



Grafik 3.14. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan kabupaten sepropinsi Bali dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Peternak dengan indicator sasaran : Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok).

Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa cakupan vaksinasi (sama dengan cakupan derajat kesehatan hewan / ternak), Kota Denpasar urutan ke 2 (dua) sepropinsi Bali, setelah Kabupaten Karangasem. Ini juga menunjukkan bahwa faktor atau komponen yang membentuk capaian B/C Ratio berusaha ternak cukup tinggi (urutan ke 2 sepropinsi Bali). Harapannya adalah semakin tinggi cakupan derajat kesehatan hewan / ternak, maka tingkat kesehatan dan pertumbuhan ternak akan semakin baik sehingga harga jual akan semakin tinggi.

f. Analisis penyebab peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan

Indicator sasaran meningkatnya pendapatan peternak dengan 2 (dua) indicator kinerja yaitu Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak dan Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok). Tahun 2025 kedua indikator ini menghasilkan capaian kinerja di atas target, yaitu indicator kinerja Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak tercapai 1,376 dari target 1,375 dan indikator cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok) tercapai 92,61% dari target 91,13%. Semakin tinggi B/C ratio dan cakupan kekebalan kelompok (herd immunity), maka semakin layak diusahakan yang akan berdampak pada pendapatan peternak juga semakin meningkat.

Pencapaian B/C Ratio berusaha ternak di Tahun 2025 ini di atas target, yang sangat berkaitan dengan Kebijakan dan regulasi yang diambil pemerintah melalui Dinas Pertanian Kota Denpasar. Dinas Pertanian Kota Denpasar sangat mendukung upaya-upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Upaya-upaya yg dilaksanakan itu antarlain :

1. mengupayakan agar petugas pelaksana kegiatan kompeten / profesional dibidangnya melalui pelatihan

2. melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) agar peternak / masyarakat memahami permasalahan agar mudah diajak untuk berpartisipasi
3. melaksanakan langkah-langkah pencegahan seperti vaksinasi secara berkala dan berkelanjutan
4. respon cepat terhadap keluhan dan pengaduan peternak / masyarakat

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Tabel 3.16. Efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efesiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya pendapatan peternak	1,375	1,376	100,07%	1.300.822.000	1.091.402.759	83,90%	16,10%
		91,20%	92,61%	101,55%	862.156.820	807.448.240	93,65%	6,35%

Sasaran meningkatnya pendapatan peternak yang mengampu 2 (dua) indikator kinerja yaitu Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak dan indikator kinerja Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok) didukung 3 (tiga) program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan 1 (satu) kegiatan/sub kegiatan alokasi dana Rp.529.925.000,-; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 1 (satu) kegiatan/sub kegiatan alokasi dana Rp.770.897.000,-; dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan alokasi dana Rp.862.156.820,-. Penyerapan anggaran pada program / kegiatan / subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran yang di atas 100% tersebut rata-rata di atas 90% tetapi tidak mencapai 100%. Dapat

disimpulkan bahwa terjadi efisiensi penggunaan anggaran mencapai 12,21% (Rp.264.127.821,-).

h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.17. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang / Tidak Menunjang
1.	Meningkatnya Pendapatan Peternak	Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak	100,07%	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Tanaman Padi, Hortikultura dan produksi ternak	Padi 110,48% Sayur ijo 102,71% Kangkung 102,36,06% Bayam 102,94% Semangka 105,53% Ternak 78,33%	Menunjang
				Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan populasi ternak	101,15%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan	100%	Menunjang
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	88,12%	Menunjang
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang berkondisi baik	150%	Menunjang

				Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pembangunan Prasarana Pertanian	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	300%	Menunjang
		Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)	101,55%	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	100%	Menunjang
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus PHMS	0% (target 0 kasus, terjadi 24 kasus)	Menunjang
				Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan	Persentase produk ASUH	100%	Menunjang

				Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			
				Sub Kegiatan : Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan	100%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pencegahan dan pengobatan penyakit hewan yang terlayani	100%	Menunjang
				Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	100%	Menunjang

Sasaran meningkatnya pendapatan peternak yang mengampu 2 (dua) indikator kinerja yaitu Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak dan cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok) didukung 3 (tiga) program yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan 1 (satu) kegiatan/sub kegiatan; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 1 (satu) kegiatan/sub kegiatan; dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Keberhasilan pencapaian kinerja Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak dan cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok) pada Tahun 2025 tidak terlepas dari langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar melalui petugas yang ada pada Dinas Pertanian melalui program dan kegiatan yang ada seperti : penyediaan vaksinasi hewan / ternak secara kontinyu, penyemprotan kandang (disinfeksi), pengawasan lalulintas ternak dan produknya, pemberian bantuan sarana produksi serta pendampingan / penyuluhan dan lain-lain.

Tabel 3.18. Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian %
1.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	529.925.000	499.969.535	94,35
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	529.925.000	499.969.535	94,35
	Sub Kegiatan : Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	529.925.000	499.969.535	94,35
2.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	770.897.000	591.433.224	76,72
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	770.897.000	591.433.224	76,72
	Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	770.897.000	591.433.224	76,72
Jumlah		1.300.822.000	1.091.402.759	83,90
3.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	862.156.820	807.448.240	93,65
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	709.143.320	664.431.285	93,69
	Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	709.143.320	664.431.285	93,69
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	69.840.000	67.933.236	97,27
	Sub Kegiatan : Pengawasan	69.840.000	67.933.236	97,27

	atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)			
	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	83.173.500	807.448.240	93,65
	Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	83.173.500	807.448.240	93,65
	Jumlah	862.156.820	807.448.240	93,65
	Jumlah total	2.162.978.820	1.898.850.999	87,79

Sasaran meningkatnya pendapatan peternak yang mengampu 2 (dua) indikator kinerja yaitu Benefit Cost (B/C) Ratio Pendapatan dan Biaya Berusaha Ternak dan Cakupan Derajat Kesehatan Hewan / Ternak (Kekebalan Kelompok), didukung 3 (tiga) program yaitu 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan; dengan total pagu Rp.529.925.000,- terealisasi Rp.499.969.535,- (94,35%); 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan; dengan total pagu Rp. 770.897.000,- terealisasi Rp. 591.433.224,- (76,72%); 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan 3 kegiatan / sub kegiatan dengan pagu Rp. 862.156.820,- terealisasi Rp. 807.448.240,- (93,65%). Total pagu yang teralokasi untuk keberhasilan pencapaian kinerja Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi pada Tahun 2025 adalah Rp.2.162.978.820,- dan terealisasi Rp.1.898.850.999,- (87,79%).

3.2. Akuntabilitas (Realisasi) Anggaran / Keuangan Dinas

Urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar pada Tahun 2025 diwujudkan melalui pelaksanaan 6 program, 13 kegiatan dan 27 subkegiatan. Akuntabilitas keuangan yang dicapai oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 berdasarkan alokasi anggaran per subkegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19. Alokasi dan realisasi anggaran belanja Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan indicator kinerja sasaran.

No	Nama Program	Keuangan		
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Realisasi
1	2	3	4	5
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.708.128.500	1.536.538.248	89,95
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
	- Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi, dan spesifik lokasi	379.839.000	293.082.665	77,16
	- Sub kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	798.364.500	743.486.048	93,13
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota			
	- Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan / Pakan	529.925.000	499.969.535	94,35
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.260.880.600	5.861.563.780	93,62
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian			
	- Sub Kegiatan : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	4.786.388.600	4.596.106.405	96,02
	- Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	703.595.000	674.024.151	95,80

No	Nama Program	Keuangan		
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Realisasi
1	2	3	4	5
	- Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	770.897.000	591.433.224	76,72
3.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	265.169.000	222.382.259	83,86
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan	265.169.000	222.382.259	83,86
4.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	659.626.090	604.999.005	91,72
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	709.143.320	664.431.285	93,69
	Kegiatan : Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	69.840.000	67.933.236	97,27
	Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	83.173.500	75.083.719	90,27
5.	Program Penyuluhan Pertanian	556.214.500	525.856.714	94,54
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	402.014.000	375.023.892	93,29

No	Nama Program	Keuangan		
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Realisasi
1	2	3	4	5
	- Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	63.000.500	62.482.822	99,18
	- Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	91.200.000	88.350.000	96,88
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	16.897.129.096	15.328.174.913	90,71
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.067.118.651	11.746.463.741	89,89
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	494.369.000	473.138.544	95,71
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.000.000	157.721.172	96,17
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.381.748.445	2.194.102.795	92,12
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.893.000	756.748.661	95,80
	TOTAL	26.549.678.516	24.281.964.154	91,46

Beberapa uraian yang berkaitan dengan realisasi anggaran Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang didukung 5 kegiatan (14 sub kegiatan), dari alokasi dana sebesar Rp.16.897.129.096,- yang terealisasi sebesar Rp.15.328.174.913,- atau 90,71%. Dari data yang ada, nilai yang cukup besar yang tidak dapat diserap berasal dari penganggaran pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (gaji beserta tunjangannya); dan pada kegiatan yang lain terjadi efisiensi belanja. Tetap perencanaan penganggaran ke depan perlu dicermati lebih teliti agar pengalokasian anggaran pada suatu kegiatan tidak menjadi mubajir.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdapat 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan. Penyerapan dananya sebesar Rp. 1.536.538.248,- (89,00%) dari alokasi anggaran Rp. 1.708.128.500,-, sisa anggaran merupakan efisiensi / sisa belanja pada belanja pengadaan pupuk, benih dan bahan kimia.

3. Program Peyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdapat 1 (satu) kegiatan (3 sub kegiatan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.260.880.600,- dengan realisasi Rp. 5.861.563.780,- (93,62%). Sisa anggaran merupakan sisa belanja Jalan Usaha Tani, Jaringan Irigasi Usaha Tani dan efisiensi belanja operasional di RPH.
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mengampu 3 (tiga) kegiatan yaitu Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota masing-masing dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Sub Kegiatan : Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu Rp.709.143.320,-. Penyerapan anggaran Rp.664.431.285,- (93,69%); dan Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan dengan pagu Rp.69.840.000,-. Penyerapan anggaran Rp. 67.933.236,- (97,67%) dan Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner dengan pagu Rp.83.173.500,-. Penyerapan anggaran Rp.75.083.719,- (90,27%). Dana yang tidak terserap sebesar Rp.54.708.580,- adalah efisiensi belanja bahan kimia dan obat-obatan.
5. Program Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dan 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang penyerapan anggarannya mencapai 83,86%, sisa anggaran merupakan efisiensi belanja Asuransi Usaha Tani Padi dan bahan kimia (pestisida).
6. Program Penyuluhan Pertanian mengampu 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan pagu Rp.402.014.000,- terealisasi

Rp.375.023.892,- (93,29%). Sisa anggaran merupakan efisiensi belanja asuransi BPJS ketenagakerjaan untuk petani (pekerja rentan).

- Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa dengan pagu Rp. 63.000.500,- terealisasi Rp. 62.482.822,- (99,18%). Sisa anggaran merupakan efisiensi belanja bahan.
- Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dengan pagu Rp. 91.200.000,- terealisasi Rp. 88.350.000,- (96,88%). Sisa anggaran merupakan efisiensi karena ada penyuluh yang pindah perangkat daerah.

3.3. Prestasi yang diraih

Prestasi yang diraih oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar pada Tahun 2025 adalah :

Tabel 3.20. Prestasi yang diraih Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Jenis Penghargaan	Yang Memberikan	Penerima	Tahun
1.	Juara I kompetisi inovasi bentuk lainnya Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025	Walikota Denpasar	Dinas Pertanian Kota Denpasar (Call Me Opa) / Panggil Saya Operator Alsintan	2025

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian Kota Denpasar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari 2 (dua) sasaran yang tertuang dalam Renstra dinas periode 2021-2026 (setelah review Renstra) yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan petani dengan indikator kinerja *Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha tani padi*.
2. Meningkatnya pendapatan peternak dengan indikator kinerja ada 2 (dua) yaitu *Benefit Cost (B/C) ratio pendapatan dan biaya berusaha ternak* dan *Cakupan derajat kesehatan hewan / ternak (kekebalan kelompok)*.

Hasil pengukuran capaian indikator kinerja sasaran dalam LKjIP Tahun 2025 ini, sebagian besar capaian kinerja telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dalam indikator kerjanya bahkan semua di atas target.

4.2. Saran

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian periode 2021-2026 sudah dilakukan proses review pada pertengahan Tahun 2022 karena indikator kinerja sasaran yang sama dengan indikator kinerja program. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), masih banyak ditemukan hambatan, yang erat kaitannya dengan penilaian SAKIP Dinas pertanian. Kedepan, agar dalam proses penyusunan dokumen perencanaan seperti Renstra, sasaran dan indikator kinerja utama lebih memperhatikan kaidah-kaidah dalam penilaian SAKIP, sehingga mampu memperoleh nilai SAKIP A.

Denpasar, 5 Pebruari 2026
Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar,



Ir. A. A. Gde Bayu Brahmasta, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660803 199203 1 008